



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers nomor: 01/HumasPMK/I/2017

**Menko PMK Koordinasikan Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Untuk Pelaksanaan Program Tahun 2017**

Jakarta (16/01) --- Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggungjawab melaksanakan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) atas seluruh program yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Adapun kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia serta membangun karakter manusia Indonesia. Terdapat 6 (enam) isu strategis dalam koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu : 1. Jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar; 2. Penanggulangan kemiskinan; 3. Perlindungan anak, perempuan dan kaum marjinal; 4. Pemberdayaan Masyarakat; 5. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi; serta 6. Revolusi Mental.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan program Tahun 2017 bidang PMK, khususnya bidang pendidikan, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kemenko PMK ini bertujuan untuk memastikan target sasaran di Tahun 2019 serta target sasaran di Tahun 2017 dapat tercapai.

"Perlu sinergi seluruh K/L untuk dapat mencapai target sasaran pembangunan 2019" jelas menko PMK.

Sejumlah indikator makro yang harus dicapai pada tahun 2019 itu diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks GINI, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Perlindungan Sosial JKN. Pada kesempatan ini, Menko PMK juga menyampaikan sekurang-kurangnya terdapat 8 (Delapan) program prioritas yang dimiliki dalam konteks Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, 5 (Lima) program prioritas dalam kerangka Peningkatan Kapabilitas hidup manusia Indonesia, dan 2 (Dua) program prioritas lainnya dalam upaya Pembangunan Karakter Manusia Indonesia.

Berdasarkan arahan Presiden di sidang kabinet paripurna pada 4 Januari 2017 lalu, pemerintah akan fokus kepada Upaya Pemerataan Kesejahteraan dengan cara mengurangi angka kesenjangan (gini ratio). Upaya pemerataan kesejahteraan itu akan diwujudkan melalui empat program utama yaitu Redistribusi aset dan legalisasi tanah, Perkuatan akses permodalan untuk rakyat, Perluasan keterampilan melalui program kejuruan dan vokasi, serta Perluasan bantuan langsung melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dari keempat program utama itu, Menko PMK meminta seluruh menteri dilingkup koordinasi Kemenko PMK untuk fokus pada tiga hal diantaranya Mengurangi Kesenjangan, Revitalisasi Vokasi, serta Perluasan KIP dan KIS yang sekaligus akan menjadi tiga fokus utama bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2017 ini.

"Manfaatkan seluruh sumber daya yang ada, terutama anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat" tutup menko PMK.

Turut hadir dalam rakor tingkat menteri kali ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa; serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Rakor tingkat menteri ini akan dilanjutkan esok hari dengan mengundang sejumlah menteri di lingkup koordinasi kemenko PMK lainnya.

*Humas dan Peprustakaan
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan*

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkoPMK